



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI DINI
DALAM MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN
DI WILAYAH JAWA BARAT
(Studi Pada Denintel Kodam III/Siliwangi)**

TESIS

**RUDI SUPRIYANTO
NPM. 102120104075**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER**

**JAKARTA
AGUSTUS 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rudi Supriyanto
NPM : 120120104075
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Judul Tesis : Efektivitas Implementasi Sistem Deteksi Dini
Dalam Mendukung Strategi Pertahanan di
Wilayah Jawa Barat
(Studi Pada Denintel Kodam III/ Siliwangi)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi dan Kampanye Militer ,Sekolah Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. G. Ambar Wulan, M Hum ()

Pembimbing : Kol. Kav. Suherman, M Sc ()

Penguji : Kol Czi . H. Sitorus, M Sc, M. Si (Han) ()

Penguji : Dr. Yudi Rusfiana, S. IP., M. Si ()

Penguji : Letkol. Laut. Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M. Sc ()

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Agustus 2014

(Rudi Supriyanto)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Supriyanto
NPM : 120 120 104 075
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Sekolah : Universitas Pertahanan
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI DINI DALAM
MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN DI WILAYAH JAWA BARAT
(Studi pada Denintel Kodam III/Siliwangi)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Agustus 2014

Yang menyatakan

(Rudi Supriyanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr.G.Ambar Wulan,M Hum dan Kol Kav Suherman,M Sc, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim Pangdam III/Slw,Letkol Kav Ginting Dandeninteldam III/Slw,Letkol Inf Rudy Rhamdan Dandim 0618/BS yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini;
- (3) Brigjen TNI Dede K Wiratmaja Kakordos Sesko TNI, Marsma TNI Wisnu Dirjemen Sesko TNI yang telah memberikan banyak kesempatan dalam penyusunan tesis, serta Kol Inf Widodo I, Letkol Inf Rachmat,Kol Arm Dwijati,Kol Laut (P) Bambang Kusumo, Kol Inf Herman Hidayat dan seluruh rekan-rekan dosen serta sahabat yang membantu saya dalam proses pengumpulan data dan pengurusan perizinan di berbagai instansi, hingga saya dapat mencurahkan perhatian saya lebih intens pada penyelesaian tesis;
- (4) Istri saya Sri Yuhana dan anak Maharani CR, yang selalu menyemangati saya, terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, Agustus 2014

Rudi Supriyanto

ABSTRAK

Nama : Rudi Supriyanto
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Judul : Efektivitas Implementasi Sistem Deteksi Dini Dalam Mendukung Strategi Pertahanan Di Wilayah Jawa Barat (Studi Pada Denintel Kodam III/Siliwangi)

Tesis ini mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen dalam mendukung strategi pertahanan wilayah serta implementasinya dalam sistem deteksi dini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terdapat efektivitas dalam pelaksanaan fungsi intelijen Denintel Kodam III Siliwangi untuk mendukung strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat. Permasalahan ini didasarkan pada tebatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finansial, fasilitas, birokrasi komunikasi, partisipasi dan dukungan publik. keterbatasan tersebut telah menurunkan efektivitas inteiljen dalam pendekatan sumber, proses dan sasaran sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas Denintel Kodam III Siliwangi dalam menghadapi ancaman politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam di Jawa Barat.

Kata kunci: efektivitas, intelijen, deteksi dini dan pertahanan wilayah

ABSTRACT

Name : Rudi Supriyanto
Program : Strategy and Military Campaign
Title : Effectiveness Implementation Early Warning System In Support Strategy Defense In West Java (Studies on Denintel Military Command III/ Siliwangi)

This thesis identifies the effectiveness of the intelligence functions in support of the defense strategy and its implementation in the areas of early detection system. This study is a descriptive qualitative research design, data collection techniques interview. The results showed that there is a lack of effectiveness in the implementation of the intelligence function Denintel Kodam III Siliwangi in support of the defense strategy of the West Java area. This problem is based on terbatasnya quantity and quality of human resources, finance, facilities, bureaucratic communication, participation and public support. The limitation has reduced the effectiveness of the approach inteiljen sources, processes and goals that have implications for the effectiveness of low Denintel Kodam III Siliwangi in the face of threats of political, economic, social, cultural and defense in West Java.

Keywords: effectiveness , intelligence , early detection and defense areas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Pertahanan Negara	9
2.1.2 Konsep Strategi Pertahanan	10
2.1.3 Intelijen dan Deteksi Dini.....	13
2.1.4 Strategi Pertahanan Wilayah di Jawa Barat	20
2.1.5 Menghadapi Ancaman Nilmiliter di Jawa Barat	32
2.1.6 Efektivitas.....	43

	2.1.4.1 Pengertian Efektivitas.....	43
	2.1.4.2 Pendekatan Efektivitas.....	47
	2.1.4.3 Ukuran Efektivitas	50
	2.1.4.4 Kriteria Pengukuran Efektivitas	54
	2.2 Penelitian Terdahulu	58
	2.3 Kerangka Pemikiran.....	62
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	66
	3.1 Pendekatan Penelitian	66
	3.2 Sumber Data Penelitian	68
	3.3 Jenis-Jenis Data.....	69
	3.4 Instrumen Penelitian	70
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	71
	3.6 Pengolahan/Analisa Data.....	74
	3.9 Keabsahan Data dan Validitas Data	74
BAB 4	PEMBAHASAN DAN ANALISA	77
	4.1 Hasil Penelitian	77
	4.1.1 Gambaran Umum Komando Daerah Militer III/ Siliwangi.....	77
	4.1.2 Denintel Kodam III/Siliwangi.....	80
	4.1.3 Gambaran Keamanan di Jawa Barat	88
	4.2 Implementasi Sistem Deteksi Dini Denintel Kodam III/Siliwangi.....	95
	4.2.1 Pengumpulan.....	100
	4.2.2 Analisa	103
	4.2.3 Kontra Intelijen	105
	4.2.4 Operasi Rahasia	106
	4.3 Efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen dalam Mendukung strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat	109

4.3.1. Efektivitas Fungsi Intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi pada Ancaman Bidang Ideologi ..	119
4.3.2 Efektivitas Fungsi Intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi pada Ancaman Bidang Politik	122
4.3.3 Efektivitas Fungsi Intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi pada Ancaman Bidang Ekonomi .	126
4.3.4 Efektivitas Fungsi Intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi pada Ancaman Bidang Sosial Budaya.....	129
4.3.5 Efektivitas Fungsi Intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi pada Ancamn Bidang Hankam.....	132
4.3.6 Efektivitas pada Pendekatan Sumber Denintel Kodam III/Siliwangi.....	135
4.3.7 Efektivitas pada Pendekatan proses Denintel Kodam III/Siliwangi.....	139
4.3.8 Efektivitas pada Pendekatan sasaran pada Denintel Kodam III/Siliwangi.....	144
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
5.1 Kesimpulan	148
5.2 Saran	149
 DAFTAR REFERENSI	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Model Dimensi Waktu dari Efektivitas	57
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Katagoriasasi Efektivitas.....	68
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Sumber Peralatan	137
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Sumber Motivasi	138
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Dukungan Lembaga Terhadap Proses.....	142
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Mekanisme Proses.....	143
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Kesesuaian Rencana....	145
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Kesesuaian Hasil	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Arti Efektivitas.....	45
Gambar 2.2 Hubungan Efektivitas	54
Gambar 2.3 Sebab Efektivitas	55
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	65
Gambar 3.1 <i>Exploratory Sequential Design</i>	67
Gambar 4.1 Struktur Implementasi Deteksi Dini Denintel Kodam III/Siliwangi.....	80
Gambar 4.2 Model Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Intelijen dalam Mendukung Strategi Pertahanan Wilayah Darat Jawa Barat	134

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Sumber Peralatan.....	138
Diagram 4.2 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Sumber Motivasi	139
Diagram 4.3 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Dukungan Lembaga Terhadap Proses.....	142
Diagram 4.4 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Mekanisme Proses ...	143
Diagram 4.5 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Kesesuaian Rencana	146
Diagram 4.6 Rekapitulasi Hasil dari Indikator Kesesuaian Hasil.....	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Kuesioner

Lampiran 4 Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas

Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 7 Hasil Uji Frekuensi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Dalam konteks pemahaman tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Dalam kerangka mencapai tujuan nasional tersebut, pertahanan negara memiliki fungsi strategis dalam keberlangsungan sebuah negara.

Adapun dalam hal ini, pertahanan negara merupakan usaha untuk melindungi dan menyelamatkan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun, dasar pertahanan menggariskan pada tiga asas utama, yaitu kepentingan-kepentingan strategi negara, prinsip-prinsip pertahanan dan konsep pertahanan. Pola ini menekankan pentingnya arti strategi dalam upaya menciptakan negara yang stabil dan aman. Dalam persepektif lain dapat pula dilihat bahwa pertahanan negara dapat digambarkan sebagai usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: a). mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b). melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;

¹ Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

c). melaksanakan Operasi Militer Selain Perang dan; d). ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional².

Pada era globalisasi ditandai, antara lain oleh pergeseran kondisi sosial masyarakat sebagaimana tercermin dengan munculnya dinamika perubahan dan persaingan dalam semua sektor kehidupan. Fenomena ini, di satu sisi menunjukkan pula adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Di sisi lain, hubungan dan pergaulan antar bangsa dan negara memunculkan fenomena baru dalam bentuk semakin ketatnya persaingan di berbagai sektor, baik pada hubungan kenegaraan maupun pada hubungan kemasyarakatan..

Implikasi tersebut berpengaruh terhadap aspek pertahanan negara dari potensi munculnya ketidakpastian dan ketidaktentuan (*turbulence and uncertainty*) sebagai dampak teknologi informasi yang semakin canggih, disamping itu masyarakatpun semakin berani dengan beragam tuntutan dan persaingan yang semakin ketat serta munculnya berbagai tekanan dan tantangan atau bahkan ancaman dari berbagai arah terhadap negara, termasuk didalamnya ancaman disintegrasi negara³.

Menurut Kusnanto⁴ bahwa sumber ancaman (*source of threat*) menyangkut “keamanan nasional” menjadi semakin kompleks, yakni bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*), tetapi menyangkut juga ancaman *azymetris* yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Sehubungan hal tersebut, watak ancaman (*nature of threat*) pun berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, Ideologi, politik, ekonomi, dan kultural.

² *Ibid.*

³ I. Nyoman Sumaryadi, *TNI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dari Perspektif Peran Teritorial TNI*, dalam Buku *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, diakses dari <http://peranteritorial.blogspot.com/>, tanggal 23 Mei 2013 pukul 14.00 WIB.

⁴ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003, hal 5.

Seperti halnya ancaman militer, ancaman ideologi dan, atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan-bentuk atau struktur institusi-institusi politiknya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan *organizing principle* antar negara yang antagonistik. Apa yang dilakukan oleh Libya dan Suriah terhadap beberapa pemerintahan moderat di Timur Tengah (Libanon.Yordan) dan Amerika terhadap rejim-rejim radikal di Amerika Latin dan Karibia (Kuba,Chille, Guatemala, Haiti). Dalam bentuk yang lebih lunak, persyaratan politik yang menyertai segenap bantuan bilateral dan multilateral, mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman politik.⁵ Untuk itu, Tentara Nasional Indonesia membutuhkan sistem deteksi dini yang efektif guna memberikan kepastian secara jelas terhadap berbagai ancaman.

Pada pelaksanaan sistem deteksi dini, intelijen berfungsi untuk mencegah berbagai tindakan yang dapat mengganggu pertahanan negara dari berbagai ancaman. Adapun Intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini yang merupakan bagian sistem strategi untuk mencegah terjadinya pendudukan yang mengancam keamanan negara⁶.

⁵ *ibid*

⁶ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Reformasi Intelijen dan Keamanan Nasional* (Pengantar) dalam *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Friedrich Ebert Stiftung dan Pacivis UI, Jakarta, 2008. hal.1.

Adapun, intelijen yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pemerintah memiliki peran penting untuk (1) menghindari kejutan-kejutan strategis (2) menyediakan keahlian jangka panjang (3) mendukung proses kebijakan dan (4) menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode.⁷ Tujuan tersebut menjelaskan bahwa intelijen berfungsi mendukung dan meningkatkan pemberdayaan wilayah, salah satunya menyangkut pertahanan darat. Konsep ini menempatkan intelijen sebagai lembaga yang memiliki arti penting dalam memberikan deteksi dini, terkait keamanan dan pertahanan negara diberbagai daerah, diantaranya daerah Jawa Barat yang berperan sebagai daerah penyangga pertahanan Ibu Kota RI.

Sebagai penyangga Jakarta, dimana Jawa Barat memiliki geografis yang strategis dan tentunya akan berkaitan terhadap dukungan pemberdayaan pertahanan darat yang salah satunya bagi Ibu Kota RI yang sebagian wilayahnya mengitari Ibukota Negara RI. Dasar tersebut menempatkan Kodam III/Siliwangi selaku kompartemen strategis mempunyai tugas dalam menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman di wilayah tanggung jawabnya. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka satuan intelijen di jajaran Kodam bertugas menyediakan Intelijen secara terus menerus untuk kepentingan perkiraan ancaman di wilayah Kodam III/Siliwangi. Satuan intelijen di tingkat Kodam III/Siliwangi dapat disebut juga dengan Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer (Deninteldam) dalam mendukung tugas pokok Kodam III/Siliwangi.

Adapun, mekanisme kegiatan Denintel dalam penyelidikan dilaksanakan berdasarkan program kerja dan analisa perkembangan situasi wilayah dari hasil penyelidikan deteksi dini yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan, operasi intelijen dilaksanakan berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan khusus, dalam hubungan ruang waktu

⁷Herman, Michael. *Intelligence Services in the Information Age.*, OR: Frank Cass Publishers, London & Portland 2001, hal 2-5.

yang terbatas dan atas dasar perintah. Sesuai fungsinya, kegiatan Denintel dalam melaksanakan kegiatan dan operasi penyelidikan dilakukan untuk mengetahui eskalasi ancaman di wilayah tanggung jawabnya dan deteksi dini serta peringatan dini terhadap perkembangan situasi yang terjadi di wilayahnya.

Namun secara empiris, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya indikasi perkembangan tentang gejala yang mengganggu keamanan di daerah Jawa Barat, seperti kegiatan-kegiatan yang mengancam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Terkait masalah tersebut, implementasi sistem deteksi dini Denintel yang telah dilakukan secara terus menerus belum menunjukkan efektivitas dalam upaya mengetahui eskalasi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam di wilayah tanggung jawabnya. Salah satu contoh dimana tidak efektifnya fungsi intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi yaitu masih terdapatnya fenomena seperti terdapatnya beberapa jaringan teroris di wilayah Jawa Barat yang mengganggu pertahanan wilayah. Selain itu masih terjadinya konflik-konflik benuansa politik, ekonomi, sosial, ideologi dan hankam di berbagai daerah membuktikan bahwa efektivitas intelijen Denintel Kodam III/Siliwangi perlu dipertanyakan. Berbagai temuan dari fenomena tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji efektivitas Denintel Kodam III/Siliwangi. Adapun temuan awal tersebut cukup dilematis ketika Denintel Kodam III/Siliwangi yang merupakan mata dan telinga TNI yang memberikan *early warning system* terhadap berbagai ancaman pertahanan negara khususnya di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tentang **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI DINI DALAM MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN DI WILAYAH JAWA BARAT (Studi Pada Denintel Kodam III/Siliwangi)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi sistem deteksi dini di Denintel Kodam III/Sililwangi?
- 1.2.2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen dalam mendukung strategi pertahanan wilayah darat di Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisa implementasi sistem deteksi dini di Denintel Kodam III/Sililwangi.
- 1.3.2. Menganalisa efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen dalam mendukung strategi pertahanan wilayah darat di Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan kajian baru terkait pengembangan studi intelijen sebagai bagian dari strategi militer, khususnya mengenai mekanisme sistem deteksi dini Denintel dalam menghadapi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

1.4.2. Manfaat Praktis.

- 1.4.2.1. Dapat memberikan masukan bagi KEMHAN RI dan TNI dalam merumuskan Kebijakan Strategi Militer di bidang intelijen dimasa mendatang.
- 1.4.2.2. Dapat memberikan masukan bagi TNI AD dan Kodam III/Siliwangi dalam merumuskan kebijakan Intelijen bagi Denintel Kodam III/Siliwangi dalam melaksanakan tugas.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada efektivitas fungsi dan mekanisme intelijen dalam mendukung strategi pertahanan wilayah darat

di Jawa Barat. Adapun pemilihan lokasi Jawa Barat sebagai wilayah kegiatan Denintel Kodam III/Siliwangi, dikarenakan letaknya yang strategis sebagai daerah penyangga pertahanan Ibu Kota RI yang tentunya akan berkaitan dengan dukungan pertahanan wilayah. Selanjutnya, penelitian ini juga dibatasi pada periode 2012-2013, karena periode ini menunjukkan adanya fenomena gangguan keamanan yang signifikan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan kajian literatur terkait kerangka teori, konsep-konsep yang relevan sebagai pisau analisis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, terutama dalam mendekati data, sumber/obyek/subyek penelitian, dan teknik pengumpulan hingga teknik menguji keabsahan data.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN ANALISA.

Bab ini membahas implementasi mekanisme sistem deteksi dini di Denintel Kodam III/Sililwangi serta efektivitas fungsi intelijen yang dilaksanakan Denintel Kodam III/Siliwangi dalam mendukung strategi pertahanan wilayah darat di Jawa Barat

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas, khususnya menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertahanan Negara

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warganegara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern.

Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subyek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi

negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai idasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang demokratis, stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik.

2.1.2 Konsep Strategi Pertahanan

Strategi pertahanan adalah hal yang sangat vital yang menentukan keberhasilan upaya pertahanan negara. Strategi pertahanan tidak statis, tetapi selalu dinamis mengikuti perkembangan sifat dan karakteristik perang serta revolusi pada bidang militer secara global. Perang pada Abad XXI memiliki sifat dan karakteristik yang jauh berbeda dengan perang pada abad sebelumnya. Perang pada Abad XXI adalah perang yang sifatnya semakin kompleks yang melibatkan faktor-faktor nirmiliter dan militer. Penghancuran suatu negara tidak selalu dengan perang fisik dengan iring-iringan konvoi kekuatan militer, tetapi dapat pula dengan melemahkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perang yang berbasis nirmiliter lebih mengemuka dibandingkan dengan perang yang berbasis kekuatan militer. Persaingan antarnegara di era globalisasi akan jauh lebih ketat. Setiap negara akan berlomba untuk lebih unggul dan mengembangkan hegemoni atas negara lain. Perang yang berdimensi nirmiliter jauh lebih berbahaya karena mandala perangnya bersifat maya, tidak kelihatan, tidak bersifat fisik, sehingga tidak mudah untuk dideteksi dan sering kali terlambat untuk diantisipasi.⁸

Perang pada Abad XXI mengandalkan keunggulan teknologi Perang di masa mendatang yang berbasis kekuatan militer akan lebih banyak mempertontonkan kecanggihan persenjataan dengan akurasi tinggi dan penguasaan ruang untuk melumpuhkan kekuatan strategis suatu negara serta mobilisasi logistik yang sangat tinggi. Perang antarnegara dengan

⁸Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Doktrin Pertahanan Negara*, Dephan, Jakarta, 2007, hal 80.

pola “satu-lawan-satu” akan semakin ditinggalkan dan beralih kepada pola kekuatan multinasional atau kekuatan sekutu melawan suatu negara yang kekuatannya lebih kecil. Karena itu, penyusunan strategi pertahanan harus secara cermat dan cerdas mengikuti perkembangan lingkungan strategis dan revolusi di bidang militer sehingga secara tepat dapat mempersiapkan alokasi sumber daya nasional yang didayagunakan menjadi kekuatan pertahanan. Strategi pertahanan negara berada pada tataran politis, berbeda dengan strategi militer yang berada pada tataran operasional militer. Strategi pertahanan negara berhubungan erat dengan politik pertahanan negara yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.⁹

Pada perwujudan tujuan pertahanan, strategi pertahanan dirancang dalam kerangka politik Indonesia yang bebas aktif disesuaikan dengan karakteristik geografi, demografi, serta kondisi sosial Indonesia yang berada dalam posisi silang yang menjadi pelintasan dunia. Efektivitas strategi pertahanan ditentukan oleh desain postur pertahanan yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang saling memperkuat dan saling menyokong. Dalam kerangka defensif aktif, pertahanan Indonesia yang berefek keluar tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional tidak terancam. Pertahanan dengan sifat defensif aktif menjadi dasar untuk tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.

Politik pertahanan yang defensif aktif tersebut mendasari pengelolaan pertahanan dengan strategi pertahanan berlapis yang bertumpu pada kemampuan sendiri dari bangsa Indonesia tanpa menggantungkan pertahanan negara pada negara lain. Atas dasar sikap

⁹ *Ibid*, hal 80-81

dan pandangan tersebut, strategi pertahanan berlapis merupakan pilihan strategi yang tepat yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang saling menyokong dalam menangkal dan menghadapi setiap bentuk ancaman. Lapis pertahanan militer yang berintikan TNI merupakan kekuatan utama pertahanan negara serta diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai kekuatan pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan dalam menangkal dan menghadapi ancaman militer. Lapis pertahanan nirmiliter dibangun dan dipersiapkan dalam menangkal dan menghadapi ancaman nirmiliter. Berdasarkan sifat dan jenis ancaman nirmiliter, susunan lapis pertahanan nirmiliter menggambarkan fungsi-fungsi keamanan publik serta fungsi-fungsi yang merespons dampak bencana, operasi kemanusiaan, fungsi sosial, ekonomi, psikologi, dan teknologi.¹⁰

Strategi pertahanan berlapis dengan sifat defensif aktif dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai fleksibilitas yang tinggi dalam mencegah dan meniadakan setiap ancaman serta menghindari pencedakan oleh pihak lawan. Strategi pertahanan berlapis pada hakikatnya pertahanan total yang diselenggarakan dengan pusatkekuatan melalui dukungan rakyat dengan memadukan komponen pertahanan militer dan nirmiliter baik dalam penangkalan maupun dalam mengatasi ancaman. Konsep pertahanan negara disusun secara fleksibel dan aktif sehingga apabila terdapat usaha atau niat negara lain yang ingin menyerang Indonesia, sistem pertahanan negara mampu mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan sebelum lawan menyerang Indonesia.

Konsepsi pertahanan negara dengan strategi pertahanan berlapis dikembangkan dalam kerangka untuk menjawab tuntutan kebutuhan pertahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi pada spektrum ancaman terhadap eksistensi negara. Kerangka strategis pertahanan berlapis tersebut disusun dalam

¹⁰ *Ibid*, hal 82

tiga kerangka utama strategi pertahanan, yakni penangkalan, menghadapi dan mengatasi ancaman militer, serta menghadapi dan menanggulangi ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap eksistensi NKRI serta dalam keikutsertaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia

2.1.3 Intelijen dan Deteksi Dini

Kajian akademik tentang intelijen didominasi oleh literatur tentang dinas-dinas intelijen Inggris dan Amerika Serikat. Sumber-sumber kepustakaan dan studi dokumen penting yang telah diteliti tentang dinas-dinas intelijen Inggris dan AS telah dirangkum dengan baik oleh Peter Gill¹¹. Namun, kajian akademik tentang aktivitas intelijen juga berkembang untuk dinas-dinas intelijen negara lain seperti Kanada, bekas Uni Soviet, negara-negara Skandinavia, Israel dan negara-negara lainnya. Perkembangan kajian tentang intelijen ini menunjukkan bahwa para akademisi ilmu sosial-politik mulai menempatkan dinas intelijen sebagai salah satu entitas yang harus dipelajari lebih dalam untuk memahami dinamika sosial-politik suatu negara¹².

Pada buku *Policing Politics: Security Intelligence and the Liberal Democratic State*, Peter Gill mengembangkan suatu analisa komparatif tentang operasi-operasi intelijen di negara-negara liberal demokratik. Ada lima ranah penelitian yang menjadi minat utama Gill, yaitu: a) intelijen dan keamanan nasional; b) budaya intelijen dan organisasi intelijen; c) metode kerja operasi intelijen; d) mekanisme koordinasi intelijen; dan e) pengawasan terhadap organisasi dan operasi intelijen¹³. Lima ranah ini menjadi minat utama Gill untuk memperlihatkan bagaimana dinas intelijen menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi strategis yang berguna untuk perumusan kebijakan keamanan nasional suatu negara.

¹¹Peter Gill, *Policing Politics: Security Intelligence and the Liberal Democratic State*, Frank Cass & Co. LTD. London, 1994. hal. 9-47.

¹² Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *op.cit*, hal. 11-12

¹³ Gill, *op.cit*, hal. 48-70.

Bagi Gill, tiga komponen utama yang harus dipelajari untuk memahami intelijen adalah keamanan nasional, otoritas intelijen, dan informasi strategis. Keterkaitan antara tiga komponen ini akan menentukan kualitas Interaksi Intelijen-Negara yang ada di suatu negara. Dalam buku ini, pengembangan kerangka Interaksi Intelijen-Negara juga dilakukan dengan meminjam beberapa komponen teoritik dari kajian hubungan sipil-militer (*Civil-Military Relations*). Metode ini telah dilakukan oleh Uri Bar-Joseph. Sama dengan para pengkaji hubungan sipil-militer, variabel utama yang dikaji oleh Bar-Joseph adalah intervensi yang dilakukan oleh dinas intelijen ke sistem politik. Seperti institusi militer, dinas intelijen dapat melakukan intervensi politik karena adanya faktor sejarah pelibatan intelijen di bidang keamanan nasional, metode kerja yang bersifat rahasia, dan kemampuan untuk melakukan operasi bawah tanah yang tertutup¹⁴.

Pada penggunaan umum, intelijen berkenaan dengan tiga hal: *pertama*, pengetahuan khusus; *kedua*, jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan tersebut; dan *ketiga*, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut¹⁵. Dalam artian yang lebih sempit, intelijen adalah bagian dari suatu kategori informasi yang lebih luas yang, dalam hirarki teori manajemen informasi modern, merupakan satu langkah dalam rantai penciptaan nilai, diawali dengan data yang kemudian menjadi informasi, dan selanjutnya pengetahuan serta akhirnya berpuncak pada kebijaksanaan. Karena pengetahuan ada pada pengguna dan bukan pada sekumpulan informasi, hanya manusia yang dapat mengambil peranan kunci dalam pembuatan pengetahuan. Informasi, yang selalu tersedia lebih banyak sehingga lebih murah, telah menjadi satu-satunya faktor produksi yang nilainya meningkat melalui penggunaannya¹⁶. Dalam Pasal 1 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Badan Intelijen Nasional menyatakan bahwa intelijen negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari sistem keamanan

¹⁴ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *op.cit*, hal.15

¹⁵ Sherman Kent, *Strategic Intelligence for US World Policy*, Archon Books, Hamden, 1965. hal. xxiii.

¹⁶ Aleksius Jemadu (ed), *Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis – Pandangan Praktisi*, Publikasi DCAF – FES SSR, volume II, Jakarta, 2007. hal. 14.

nasional. Definisi ini sudah mencerminkan kesadaran pentingnya menjadikan lembaga intelijen sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional, tetapi masih belum cukup membantu publik memahami intelijen maupun membatasi aktivitas intelijen¹⁷.

Beberapa definisi resmi intelijen yang ditawarkan Amerika Serikat menekankan pemahaman intelijen sebagai produk jadi ketimbang proses koleksi dan analisis. Pada sisi positif, definisi seperti ini menekankan bahwa produk informasi tidak dapat dikatakan produk intelijen bila belum melewati proses analisis yang menyeluruh. Namun definisi ini kurang mengeksplorasi sisi organisasional dari intelijen, sehingga masih kurang memberi kejelasan aktivitas intelijen. Definisi ini antara lain tertulis pada *Dictionary of Military and Associated Terms* yang mendefinisikan intelijen sebagai: *The product resulting from collection, processing, integration, analysis, evaluation and interpretation of available information concerning foreign countries or areas*¹⁸. Namun kelemahan lain dari definisi yang menekankan pada intelijen sebagai produk adalah kemungkinan kesalahan interpretasi intelijen semata-mata sebagai informasi. Seperti yang dikemukakan Michael Warner: *It is what people do with data and information that gives them the special quality that we casually call intelligence*¹⁹. Salah satu yang menjadi komponen kunci bagi intelijen, yaitu kerahasiaan (*secrecy*). Komponen kerahasiaan ini lah yang membedakan intelijen dengan aktivitas-aktivitas intelektual lainnya. Abram Shulsky adalah pengamat intelijen yang memiliki definisi yang sudah memahami hal ini, ia mengatakan:

*Intelligence is the official, secret collection and processing of information on foreign countries to aid in formulating and implementing foreign policy and the conduct of covert activities abroad to facilitate implementation of foreign policy*²⁰.

Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukan lah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata "*foreign policy*" yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagai fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi target menjadi tidak terpengaruh. Penerapan definisi

¹⁷ Ali Wibisono dan Faisal Idris, *Panduan Perancangan UU Intelijen Negara*, Jakarta, Pacivis, 2006. hal.72.

¹⁸ Ali Abdullah Wibisono, *Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara*, IDSPS Press, Jakarta, 2009. hal.6

¹⁹ Michel Warner, *Wanted: A Definition of "Intelligence" Studies in Intelligence*, 46, 3, 2002. Hal.15-23 dalam Ali Abdulillah Wibisono, *ibid.* hal.7

²⁰ *Ibid.*

intelijen yang berasal dari negara-negara Anglo-Saxon ini tentu tidak serta-merta sesuai dengan kenyataan di Indonesia, sebab saat ini Indonesia cenderung lebih menonjolkan fungsi lembaga intelijen sebagai lembaga keamanan, ketimbang sebagai lembaga pengumpulan dan analisis informasi. Kondisi seperti ini terutama relevan bagi negara-negara dengan konsolidasi internal yang belum kokoh seperti Indonesia, sehingga ancaman-ancaman internal masih mendominasi persepsi keamanan kita²¹.

Tujuan intelijen adalah untuk memberi informasi kepada pemerintah: *menyatakan kebenaran kepada kekuasaan*. Intelijen melayani dan berada di bawah pembuatan kebijakan. Intelijen ada untuk: *pertama*, menghindari kejutan-kejutan strategis; *kedua*, menyediakan keahlian jangka panjang; *ketiga*, mendukung proses kebijakan; dan *keempat*, menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, sumber, dan metode²². Intelijen juga merupakan tenaga ahli pemerintah dalam hal metode pengumpulan dan eksploitasi data dan informasi, tetapi pada saat yang sama dalam tingkatan tertentu berfungsi sebagai ahli tentang masalah-masalah tertentu, dan perannya mencari keseimbangan yang rumit di antara keduanya. Secara formal, cakupan intelijen tampaknya tidak terbatas karena hanya ada sedikit panduan tentang pokok masalah yang tidak boleh ditanganinya. Namun, ada batasan-batasan tentang hal-hal dimana ia memiliki kewenangan.

Sebagai garis pertama pertahanan, badan intelijen memberi kontribusi pada kemampuan demokrasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa dan rakyatnya, untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, dan agar fungsi negara dapat dijalankan dengan efektif serta efisien. Di tangan pemimpin demokrasi yang bertanggungjawab, intelijen adalah salah satu pendukung utama agar negara dapat menjalankan kewajibannya yang mutlak terhadap rakyat untuk menjamin bahwa ancaman terhadap keamanan dapat diketahui secara dini untuk

²¹ *Ibid.*

²² Michael Herman, *Intelligence Services in the Information Age*, Frank Cass Publishers, London & Portland, OR, 2001. hal. 7-9.

menghadapinya sehingga, cedera, kematian dan kerusakan dapat dicegah²³.

Sistem Deteksi dini yang berjalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (*cover of action*).

Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Deskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana-rencana dan langkah-langkahnya.

²³ Aleksius Jemadu (ed), *op.cit*, hal.16.

Setiap informasi yang diberikan anggota yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Proses Analisis Intelijen meliputi²⁴:

- a. Pengumpulan Bahan/Data. Bahan/data dikumpulkan dari sumber data terbuka dan tertutup yang sudah direncanakan dalam analisis sumber. Pengumpulan ini bertujuan menilai kualitas dan kuantitas data yang dapat digunakan. Apabila ada kekurangan/kekosongan data perlu diminta kepada badan pengumpul di lapangan, hal ini tentu memerlukan waktu dan analisis terikat pada waktu penyerahan tulisan Intelijen kepada pengguna.
- b. Pembuatan Hipotesa. Setelah data terkumpul dibuat hipotesa. Hipotesa adalah pernyataan yang membimbing analisis dalam pencarian data yang mendukung atau menolak pernyataan tersebut. Dalam pengertian umum hipotesa adalah pernyataan sementara yang dianggap benar, yang kemudian peneliti berusaha membuktikan apakah benar atau tidak benar.
- c. Pengumpulan Data Tambahan. Langkah ini digunakan apabila hipotesa menghendaki data tambahan untuk meningkatkan mutu data yang mendukung hipotesa.
- d. Analisis. Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat. Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu :
 - a) Untuk mencari kebenaran factual.

²⁴ Arham Gusdiar, *Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas*, diakses dari http://arhamgusdiar.blogspot.com/2012/08/peran-intelijen-keamanan-dalam_1832.html, tanggal 30 Mei 2013 pukul 01.14 WIB.

b) Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus.

- e. Konklusi. Konklusi adalah bagian paling penting dalam proses analisis. Analisis harus mencapai konklusi, yaitu bagian akhir dalam penulisan. Konklusi memuat sebuah ringkasan yang singkat yang ditarik dari inti pembahasan (analisis), kemudian diproyeksikan ke masa depan dalam jangka dekat atau jangka panjang. Hal ini serupa dengan "Perkiraan" mengenai tema pokok tulisan.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan ancaman terhadap pertahanan yang terjadi terutama di era globalisasi, dimana demokratisasi, keterbukaan dan hak azasi manusia menjadi isu sentral yang merambat dunia, menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran TNI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, intelijen menjadi komponen terdepan TNI dalam merespon berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen, baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap intelijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah, serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan

terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah gangguan kamtibmas yang mungkin bisa terjadi.

2.1.4 Strategi Pertahanan Wilayah di Jawa Barat

Strategi pertahanan adalah hal yang sangat vital yang menentukan keberhasilan upaya pertahanan wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta. Pada perkembangannya, strategi pertahanan di wilayah Jawa Barat tidak statis, tetapi selalu dinamis mengikuti perkembangan sifat dan karakteristik ancaman serta revolusi pada bidang militer secara global. Sebagai contoh ancaman pada jaman reformasi memiliki sifat dan karakteristik yang jauh berbeda dengan ancaman pada era orde lama dan orde baru. Perkembangan ancaman pada saat ini adalah perang yang sifatnya semakin kompleks yang melibatkan faktor-faktor nirmiliter dan non tradisional. Penghancuran suatu pertahanan negara tidak selalu dengan perang fisik dengan iring-iringan konvoi kekuatan militer, tetapi dapat pula dengan melemahkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Realitas terjadi ketika ancaman yang berbasis nirmiliter lebih mengemuka dibandingkan dengan ancaman yang berbasis kekuatan militer. Ancaman yang berdimensi nirmiliter jauh lebih berbahaya karena mandala ancamannya bersifat maya, tidak kelihatan, tidak bersifat fisik, sehingga tidak mudah untuk dideteksi dan sering kali terlambat untuk diantisipasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa ancaman wilayah darat Jawa Barat pada saat ini tidak terlepas juga akan mengandalkan keunggulan teknologi, hal ini dikarenakan ancaman di masa mendatang yang berbasis kekuatan militer akan lebih banyak mempertontonkan kecanggihan Alutsista yang akan memberikan nuansa ancaman-ancaman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perkembangan ancaman yang semakin kompleks tersebut, penyusunan strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat harus secara cermat dan cerdas mengikuti perkembangan lingkungan strategis dan revolusi di bidang militer sehingga secara tepat dapat mempersiapkan

alokasi sumber daya nasional yang didayagunakan menjadi kekuatan pertahanan. Strategi pertahanan negara berada pada tataran politis, berbeda dengan strategi militer yang berada pada tataran operasional militer. Strategi pertahanan negara berhubungan erat dengan politik pertahanan negara yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.²⁵

Pada perwujudan tujuan pertahanan, strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat dirancang dalam kerangka politik Indonesia yang bebas aktif disesuaikan dengan karakteristik geografi, demografi, serta kondisi sosial Jawa Barat selaras dengan wilayah Negara Indonesia yang berada pada posisi silang yang menjadi pelintasan dunia. Efektivitas strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat ditentukan oleh desain postur pertahanan yang memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang saling memperkuat dan saling menyokong. Dalam kerangka defensif aktif, pertahanan wilayah darat Jawa Barat yang berefek keluar tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional tidak terancam. Pertahanan dengan sifat defensif aktif menjadi dasar untuk tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan wilayah Jawa Barat dengan negara lain.

Politik pertahanan yang defensif aktif tersebut mendasari pengelolaan pertahanan wilayah darat Jawa Barat dengan strategi pertahanan berlapis yang bertumpu pada kemampuan sendiri dari bangsa Indonesia tanpa menggantungkan pertahanan negara pada negara lain. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat yang berlapis merupakan pilihan strategi yang tepat untuk memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang saling menyokong dalam menangkal dan menghadapi setiap bentuk ancaman wilayah darat Jawa

²⁵*Op.cit* Departemen Pertahanan Republik Indonesia, hal 80-81

Barat. Lapis pertahanan militer yang berintikan TNI merupakan kekuatan utama pertahanan negara serta diperkuat oleh komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan dalam menangkal dan menghadapi ancaman militer. Lapis pertahanan nirmiliter dibangun dan dipersiapkan dalam menangkal dan menghadapi ancaman nirmiliter. Berdasarkan sifat dan jenis ancaman nirmiliter, susunan lapis pertahanan nirmiliter menggambarkan fungsi-fungsi keamanan publik serta fungsi-fungsi yang merespons dampak bencana, operasi kemanusiaan, fungsi sosial, ekonomi, psikologi, dan teknologi.²⁶

Strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat berlapis dengan sifat defensif aktif dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai fleksibilitas yang tinggi dalam mencegah dan meniadakan setiap ancaman serta menghindari pendudukan oleh pihak lawan. Strategi pertahanan berlapis pada hakikatnya pertahanan total yang diselenggarakan dengan pusat kekuatan melalui dukungan rakyat dengan memadukan komponen pertahanan militer dan nirmiliter baik dalam penangkalan maupun dalam mengatasi ancaman wilayah darat Jawa Barat. Konsep pertahanan wilayah darat Jawa Barat disusun secara fleksibel dan aktif sehingga apabila terdapat usaha atau niat negara lain yang ingin menyerang Indonesia, sistem pertahanan wilayah darat Jawa Barat mampu mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan sebelum lawan menyerang Ibu Kota Indonesia.

Konsepsi pertahanan wilayah darat Jawa Barat dengan strategi pertahanan berlapis dikembangkan dalam kerangka untuk menjawab tuntutan kebutuhan pertahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi pada spektrum ancaman terhadap eksistensi negara di wilayah Jawa Barat. Kerangka strategis pertahanan wilayah darat Jawa Barat berlapis tersebut disusun dalam tiga kerangka utama strategi pertahanan, yakni penangkalan, menghadapi dan mengatasi ancaman militer, serta menghadapi dan menanggulangi

²⁶ *Ibid*, hal 82

ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap eksistensi NKRI serta dalam keikutsertaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Penangkalan adalah substansi yang paling fundamental dari strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat. Strategi pertahanan wilayah darat Jawa Barat yang modern tidak sekadar bagaimana upaya pertahanan negara menghancurkan musuh, tetapi bagaimana menciptakan kondisi yang mempengaruhi calon lawan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Upaya penangkalan diarahkan untuk semaksimal mungkin membangun kesan bagi calon lawan bahwa menyerang ibu kota Indonesia akan berujung pada kegagalan dan kehancuran yang memalukan.

Sebagai bangsa yang tidak berada dalam suatu sekutu pertahanan dengan negara lain, kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Penangkalan wilayah darat Jawa Barat dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan senjata yakni Alutsista yang andal dengan prajurit yang terampil dan profesional untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Sedangkan lapis pertahanan nirmiliter mengandalkan kemampuan dan usaha pertahanan tidak bersenjata dengan mendayagunakan faktor-faktor ideologi, diplomasi dan politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi.

Penangkalan dibangun untuk mewujudkan kesiapsiagaan segenap kekuatan dan kemampuan yang menampilkan efek penangkalan ke luar dan ke dalam. Efek penangkalan ke luar diarahkan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan pertahanan wilayah darat Jawa Barat yang disegani minimal di tingkat kabupaten dan kota yang mengitari ibu kota Indonesia. Penangkalan wilayah darat Jawa Barat yang berefek ke dalam adalah membangun kemampuan pertahanan untuk menghasilkan daya penangkal bagi setiap potensi ancaman yang

bersumber dari dalam negeri sekaligus memberikan efek ganda dalam mendorong percepatan pembangunan nasional mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi.

Konsep penangkalan yang dibangun dan dikembangkan untuk mencegah setiap bentuk ancaman wilayah darat Jawa Barat adalah penangkalan dengan cara penolakan sekaligus penangkalan dengan cara pembalasan. Penangkalan dengan cara penolakan mengandalkan kekuatan pertahanan militer dengan keunggulan Alutsista yang dimiliki sertadukung pertahanan nirmiliter yang membuat pihak-pihak yang berniat mengancam wilayah darat Jawa Barat, baik aktor negara maupun aktor bukan negara, merasa gentar dan membatalkan niatnya. Penangkalan secara penolakan diwujudkan ke dalam postur pertahanan militer yang dibangun sampai pada tingkat kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang mampu mengawal dan mengamankan wilayah darat Jawa Barat dari ancaman militer lawan yang bersifat konvensional. Untuk mewujudkan penangkalan secara penolakan, postur pertahanan militer berbasis kemampuan Alutsista yang modern dengan ukuran kekuatan jauh di atas kemampuan kolektif yang dimiliki oleh negara-negara di sekeliling.

Penangkalan secara penolakan dalam tingkatan tertentu, khususnya menghadapi ancaman agresi, merupakan pertahanan berbasis Alutsista yang ideal yang berkonsekuensi memerlukan pengalokasian anggaran pertahanan yang sangat besar. Upaya untuk membangun kekuatan pertahanan wilayah darat Jawa Barat dengan standar penolakan akan mengorbankan sektor-sektor pembangunan nasional di luar bidang pertahanan, sehingga model ini sangat sulit diwujudkan tanpa diikuti dengan pertumbuhan dan kesejahteraan yang cukup tinggi.

Penangkalan dengan cara pembalasan adalah konsep penangkalan yang mengandalkan kemampuan balas yang hebat yang timbul dari perlawanan rakyat tanpa mengenal menyerah. Penangkalan dengan pendekatan pembalasan adalah pilihan strategi bagi negara yang tidak memiliki kekuatan senjata nuklir atau yang tidak memiliki keunggulan

kekuatan militer konvensional. Konsep penangkalan dengan pendekatan pembalasan sangat efektif untuk menghadapi ancaman agresi atau invasi militer dari negara yang kekuatannya lebih kuat. Konsep penangkalan wilayah darat Jawa Barat dengan pembalasan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan perang berlarut dengan keunggulan pada perlawanan gerilya yang efektif untuk menguras kekuatan lawan yang unggul teknologi persenjataan sehingga membuatnya frustrasi dan pada akhirnya tidak mampu lagi melanjutkan tindakannya.

Pada perwujudan penangkalan di wilayah darat Jawa Barat yang efektif dan andal, pembangunan nasional menjadi kunci keberhasilan yang harus didorong bersama. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan penangkalan harus ditempuh dengan cakupan pembangunan SDM berkualitas, sehat, cerdas, dan berdaya saing pengelolaan SDM dan SDB secara tetap dalam suatu manajemen wilayah darat Jawa Barat yang sehat, serta pembangunan dan penataan sarana dan prasarana nasional untuk membuka akses secara luas di seluruh wilayah darat Jawa Barat

Strategi penangkalan wilayah darat Jawa Barat menyinergikan instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer.

1. Instrumen Politik Jawa Barat

Politik merupakan salah satu instrumen utama yang menopang suatu bangsa di samping instrumen lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan militer. Dalam konteks pertahanan wilayah darat Jawa Barat, instrumen politik merupakan kekuatan nasional yang efektif untuk menyelesaikan bentuk-bentuk konflik. Kekuatan politik terletak pada kemampuan diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk untuk membangun kepercayaan dalam kerangka mencegah konflik dan ancaman. Kemampuan diplomasi bersandar pada kualitas dan integritas pengembalian fungsi diplomasi. Di samping itu, kemampuan diplomasi ditentukan oleh reputasi dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola pemerintahan negara di wilayah darat Jawa Barat. Upaya diplomasi akan efektif apabila didukung oleh

instrumen ekonomi dan militer yang memadai dan berkemampuan tinggi sehingga menghasilkan posisi tawar yang tinggi. Pertahanan militer merupakan kekuatan yang efektif untuk memperkuat upaya diplomasi yang dilakukan oleh fungsi pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer pada akhirnya menjadi kekuatan negara yang disiapkan untuk dikerahkan guna melakukan tahapan lanjutan dari upaya pertahanan wilayah darat Jawa Barat apabila diplomasi mengalami jalan buntu.

Pertahanan wilayah darat Jawa Barat yang diselenggarakan dengan bersandar pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan penyelenggaraan pertahanan wilayah darat Jawa Barat pada kekuatan nasional sebagai modal dasar untuk diberdayakan semaksimal mungkin. Meskipun tidak melibatkan diri dalam suatu pakta pertahanan, Indonesia dengan kemampuan diplomasi tetap menggalang komunikasi dengan negara-negara lain yang memberikan efek penangkalan dengan mengembangkan pola jaringan laba-laba yang terintegrasi pada tingkat nasional, regional dan supra regional. Pada tingkat nasional, hal itu dikembangkan dalam wujud jaringan terpadu ketahanan nasional di tingkat pusat dan daerah, di perkotaan dan pedesaan, serta wilayah perbatasan dan daerah terpencil, termasuk pulau-pulau kecil terdepan.

2. Instrumen Ekonomi wilayah darat Jawa Barat

Ekonomi merupakan hal mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup suatu bangsa. Instrumen ekonomi mencakupi sumber daya alam, sumber daya buatan, moneter, fiskal, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Ekonomi yang sehat dan stabil akan memungkinkan pembangunan pertahanan berjalan dengan baik. Jawa Barat dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat Jawa Barat yang sejahtera akan memiliki

kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara bermula dari kebanggaan menjadi bangsa Indonesia.

Pada strategi pertahanan defensif aktif, sektor ekonomi harus mengambil peran konkret, melalui pembangunan sektor ekonomi yang sehat sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dibangun secara mutualistik, dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki posisi tawar tinggi sehingga dapat digunakan dalam menerapkan strategi defensif aktif. Jawa Barat harus dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi, dalam kondisi Indonesia dikenai restriksi, embargo, atau sanksi ekonomi dalam skala besar berupa blokade ekonomi, Jawa Barat harus dapat mengatasinya dengan kemampuan ekonomi sendiri. Oleh karena itu aspek ekonomi harus dibangun pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari risiko ekonomi yang berimplikasi pada pertahanan wilayah darat Jawa Barat. Dalam konteks defensif aktif, ekonomi harus menjadi instrumen penekan terhadap ancaman lain yang mengancam wilayah darat Jawa Barat. Sumber daya alam yang menjadi andalan dan menjadi ketergantungan negara-negara industri perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mempertinggi posisi tawar, baik dalam hubungan bilateral maupun hubungan yang lebih luas. Dalam era globalisasi, ekonomi dan perdagangan menjadi faktor utama. Dalam hal ini, wilayah darat Jawa Barat perlu menempatkan diri sebagai pemain, tidak sekedar hanya menjadi pasar dari produk-produk negara lain.

3. Instrumen Psikologi wilayah darat Jawa Barat

Pada perang modern, aspek psikologis merupakan salah satu faktor penting yang dikembangkan dalam menyusun strategi

pertahanan. Aspek psikologis sebagai instrumen penangkalan dikembangkan melalui pembangunan nasional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, dan militansi bangsa Indonesia untuk mencintai dan membela NKRI. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan percaya diri bangsa sebagai faktor psikologis yang berdimensi penangkalan, pemerintah perlu menghidupkan kembali upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dengan menggunakan media massa dan alat-alat komunikasi massa seperti film, tayangan televisi, surat kabar, dan buku-buku pelajaran. Film-film perjuangan dapat menjadi media untuk mengkomunikasikan kepada generasi muda khususnya Jawa Barat tentang pahit-getirnya usaha untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dapat memfasilitasi pembuatan film-film dokumenter dan mengikutsertakan pengusaha-pengusaha dalam negeri untuk ikut terlibat dalam pembuatannya dan mempromosikannya kepada masyarakat.

4. Instrumen Teknologi

Ciri pertahanan modern adalah pertahanan berbasis teknologi sesuai perkembangan dalam bidang militer. Instrumen teknologi mencakup dimensi Alutsista, sistem informasi, serta industri yang mendukung pertahanan. Secara global, revolusi di bidang militer berkembang sangat pesat dan mempengaruhi konsepsi pertahanan di bidang doktrin, strategi pertahanan, serta postur dan kebijakan pertahanan setiap negara. Substansi yang paling menonjol adalah di bidang teknologi. Dalam strategi penangkalan, teknologi memegang peranan penting. Ketergantungan pada negara lain di bidang teknologi akan berdampak terhadap daya tangkal bangsa. Sebaliknya, kemandirian dalam bidang teknologi, terutama teknologi militer, berefek terhadap peningkatan daya tangkal bangsa. Dalam rangka

mewujudkan penangkalan di bidang teknologi, sektor pertahanan wilayah darat Jawa Barat mendorong usaha-usaha untuk tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Industri pertahanan dikembangkan untuk mampu memproduksi Alutsista dan alat peralatankebutuhan sektor pertahanan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan kemandirian pertahanan di bidang teknologi, khususnya industri pertahanan, kemampuan SDM Jawa Barat akan didorong dan diberi ruang sebesar-besarnya untuk mengembangkan karya-karyanya.

5. Instrumen Militer di Jawa Barat

TNI merupakan instrumen utama kekuatan nasional dalam rangka mendukung kepentingan nasional bersama-sama dengan instrumen lainnya. Kekuatan militer digunakan sebagai langkah terakhir apabila cara-cara nirmiliter gagal untuk melindungi kepentingan nasional di wilayah darat Jawa Barat. Penggunaan kekuatan militer sebagai jalan terakhir merupakan filosofi bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Upaya diplomasi akan mencapai hasil yang maksimal apabila didukung oleh kekuatan militer.

Pada tataran politis, dukungan kekuatan militer terhadap upaya diplomasi ditentukan oleh kondisi instrumen militer yang dibangun dalam postur pertahanan negara yang kuat dan berdaya tangkal tinggi yang mencakupi prajurit yang profesional, Alutsista yang andal dan sebanyak mungkin diproduksi sendiri, manajemen pertahanan yang efektif, serta kepemimpinan militer yang kuat dan disegani. Pada tataran strategis, dukungan militer terhadap upaya diplomasi diwujudkan dalam pameran kekuatan militer, kesiapsiagaan kekuatan militer yang prima, serta hubungan TNI-rakyat yang harmonis dan bersinergi. Dalam pola defensif aktif, kekuatan militer harus dibangun untuk mempunyai kemampuan yang berdaya tangkal memadai sehingga disegani oleh negara lain.

Pembangunan kemampuan militer tersebut dilakukan selain atas dasar pertimbangan kemampuan ekonomi negara, juga analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap wilayah darat Jawa Barat.

Pertahanan militer wilayah darat Jawa Barat dikembangkan dalam keterpaduan Tri Matra, yakni matra darat, matra laut dan matra udara, tanpa meninggalkan ciri khas matra, baik dalam operasi gabungan maupun operasi khas matra masing-masing. Penggunaan kekuatan TNI, baik dalam rangka menghadapi ancaman maupun dalam hal membantu fungsi pemerintahan di luar fungsi pertahanan, diselenggarakan dalam pola operasi militer. Dalam menghadapi ancaman militer yang berakibat langsung terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, TNI menyelenggarakan operasi militer untuk perang (OMP). Pelaksanaannya melalui keputusan politik yang tertuang dalam pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden. Bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi dengan pola OMP mencakupi agresi militer dari negara lain atau jenis ancaman militer lainnya yang secara langsung mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Jawa Barat, seperti pelanggaran wilayah dan pemberontakan bersenjata. Sedangkan ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dan tingkat risikonya diperkirakan tidak berpengaruh langsung terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dihadapi dengan OMSP. Bentuk-bentuk ancaman militer dimaksud termasuk kegiatan spionase, sabotase, aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme, ancaman keamanan di laut dan udara, penangkapan ikan secara ilegal, dan konflik komunal.

Tugas-tugas perbantuan TNI melalui pelibatan kekuatan TNI dalam fungsi instansi pemerintah di luar fungsi pertahanan, termasuk tugas perdamaian dunia, diselenggarakan dalam pola OMSP. Pelaksanaannya atas permintaan dari pihak yang memerlukan bantuan. Khusus untuk tugas perdamaian dunia, pelibatan kekuatan TNI dilaksanakan atas keputusan politik

pemerintah serta berada di bawah mandat PBB, atau atas kesepakatan regional yang bersifat mengikat untuk tugas perdamaian di kawasan.

2.1.5 Menghadapi Ancaman Nirmiliter di Jawa Barat

Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional khususnya Jawa Barat. Terganggunya stabilitas Jawa Barat tidak saja menghambat pembangunan, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Ancaman nirmiliter sesuai dengan sifatnya dihadapi dengan pendekatan nirmiliter yang menempatkan departemen dan lembaga nondepartemen sebagai unsur utama dan TNI (Kodam III/Siliwangi) sebagai pendukung. Dinamika politik dan keamanan yang terjadi di sejumlah negara serta krisis ekonomi dan sosiokultural telah menyebabkan tingkat kesenjangan yang makin lebar. Kondisi tersebut lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara serta memunculkan aktor-aktor non-negara yang memanfaatkan titik-titik rawan di setiap negara.

Indonesia dengan posisi silang, serta dikelilingi oleh banyak negara yang sedang mengalami dinamika politik, keamanan, ekonomi, dan sosiokultural, seperti digambarkan di atas, tidak tertutup kemungkinan dampaknya akan mempengaruhi kondisi domestik Jawa Barat. Dampak dimaksud di antaranya dapat berwujud ancaman keamanan lintas negara, seperti aksi terorisme, gangguan keamanan di laut dan dirgantara, isu-isu keamanan di perbatasan, dan bentuk-bentuk ancaman keamanan lintas negara lainnya. Tindakan ancaman keamanan lintas negara tersebut harus ditangani agar kepentingan nasional dapat dilindungi dan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini Jawa Barat dapat ditegakkan. Untuk menangani ancaman nirmiliter tersebut, pertahanan

nirmiliter dan pertahanan militer melaksanakan fungsi masing-masing secara proporsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Ancaman dan gangguan keamanan yang berdimensi pertahanan yang timbul di dalam negeri menjadi fungsi pertahanan untuk menghadapinya. Bentuk-bentuk ancaman dan gangguan, seperti separatisme, pemberontakan, ancaman, dan gangguan terhadap objek vital nasional, ancaman terhadap keamanan Presiden dan Wakil Presiden, beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia, termasuk dampak bencana alam, tergolong ke dalam domain fungsi pertahanan negara yang melibatkan unsur-unsur pertahanan baik militer maupun nirmiliter. Bentuk ancaman nirmiliter yang dihadapi sangat beragam sehingga dalam pelaksanaannya terdapat departemen/LPND yang akan menjadi penjur, sedangkan departemen/LPND yang lain bersifat membantu.

1. Menghadapi Ancaman Berdimensi Ideologi

Salah satu ancaman nirmiliter yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman yang berdimensi ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila dan konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis.

Lapis terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni departemen atau LPND yang membidangi ideologi. Departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan

jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbang”. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan memberikan pengajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara.

Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yang di laksanakan oleh unsur-unsur nirmiliter sesuai bidangnya masing-masing, terutama materi nonfisik. Komunikasi sosial TNI diselenggarakan dalam format peningkatan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan perumahan dalam rangka revitalisasi Pancasila.

2. Menghadapi Ancaman Berdimensi Politik

Dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang berdimensi politik, pertahanan nirmiliter di bidang politik menjadi unsur dan kekuatan utama yang dibantu oleh unsur nirmiliter lainnya, termasuk perkuatan dari unsur pertahanan militer. Langkah-langkah yang ditempuh menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam

negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan Tiga Pilar berikut.

Pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi yang efektif dan kontekstual bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. Ketiga, Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi massa sebagai instrumen dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subjek politik dan subjek pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara

lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global.

Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nirmiliter.

3. Menghadapi Ancaman Berdimensi Ekonomi

Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal. Bahkan, kondisi perekonomian nasional yang cukup tinggi tersebut menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif.

Tantangan perekonomian Indonesia ke depan diperhadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya akselerasi pembangunan perekonomian

nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi-politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri.

Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

4. Menghadapi Ancaman Berdimensi Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, bencana sebagai akibat perbuatan

manusia. Isu-isu tersebut lama-kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada dasarnya timbul sebagai akibat masih melekatnya watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk kerusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia.

Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta-merta dan sulit dikontrol. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Diakui bahwa nilai-nilai luar tidak semuanya negatif; banyak pula nilai positif yang memberikan efek kemajuan untuk diterapkan. Nilai-nilai luar yang positif, antara lain kedisiplinan, keuletan bekerja dan belajar, serta pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang produktif sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera. Nilai-nilai positif tersebut patut diadopsi dan diterapkan dalam membangun masyarakat Indonesia. Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang melemahkan bangsa Indonesia di antaranya adalah peredaran narkoba dan obat terlarang yang mengancam generasi muda Indonesia. Di samping

itu, peredaran media pornografi serta perdagangan wanita selain mengancam moral juga menjadi media penyebaran virus HIV/AIDS. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung sering kali menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang mengancam nilai-nilai serta kearifan lokal maupun nasional, sehingga ketahanan nilai-nilai budaya merupakan suatu keniscayaan.

5. Menghadapi Ancaman Berdimensi Hankam

Ancaman terhadap hankam dalam sistem pertahanan negara menempatkan unsur-unsur pemerintahan di bidang keselamatan umum sebagai unsur utama dalam menghadapinya. Fungsi Hankam bersifat multi-instansi yang mencakupi, antara lain, penanganan terhadap penanggulangan dampak bencana alam dan bencana buatan manusia, penyakit pandemi, keselamatan transportasi, serta pengungsian. Tersedianya suatu manajemen yang mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan dan nonpemerintahan dalam satu kesatuan pengendalian merupakan strategi penanganan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan umum. Peringatan dini, mitigasi, penanganan mulai tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi merupakan strategi yang digunakan dalam menghadapi ancaman tersebut. Untuk menghadapi wabah penyakit pandemik yang merupakan salah satu ancaman terhadap keselamatan umum, instrumen penanganan yang dikedepankan berasal dari unsur kesehatan, atau pertanian, bergantung pada titik berat bahaya yang dihadapi serta dibantu unsur-unsur dari sektor yang lain.

Untuk penanggulangan dampak bencana alam, unsur utama bertindak untuk mendinamisasikan kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret untuk mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi. Unsur utama tersebut berasal dari pertahanan

nirmiliter yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana alam dan didukung oleh unsur-unsur lainnya.

Lapis pertahanan militer dalam hal keselamatan umum yang menyangkut penanganan dampak bencana alam dengan skala besar adalah menggerakkan TNI sebagai kekuatan yang siap dikerahkan dan digunakan untuk membantu unsur-unsur pertahanan nirmiliter lainnya. Pelibatan TNI dalam penanganan bencana alam pelaksanaannya dalam kerangka OMSP. Dalam penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, kinerja sektor pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selama ini telah ditunjukkan secara baik. Peran aktif TNI dalam menanggulangi dampak bencana yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia selama ini membuktikan bahwa TNI memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan untuk tampil sebagai instrumen negara yang diandalkan.

Untuk menghadapi kemungkinan pelibatan TNI dalam tugas-tugas serupa di masa datang, pemberdayaan kemampuan TNI yang meliputi bidang manajemen, keterampilan prajurit, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prioritas pemerintah. Dalam bidang manajemen, upaya peningkatan diarahkan pada penataan organisasi, mekanisme kerja, sistem komando dan pengendalian serta hubungan antar departemen/lembaga. Dalam bidang keterampilan prajurit, upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan fungsi dan peran kelembagaan TNI yang mampu membekali prajurit dengan keterampilan yang diperlukan dalam tugas-tugas tersebut. Dalam hal dukungan sarana dan prasarana, pemerintah akan memperlengkapi TNI dengan Alutsista yang menjamin mobilitas TNI serta alat peralatan modern, yang dapat digunakan selain untuk kepentingan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer,

juga dapat dimanfaatkan dalam tugas-tugas penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya pada Keputusan Panglima TNI nomor :Skep/141/IV/2005 tgl 7 april 2005 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (binter) th 2005-2006 adalah merupakan salah satu strategi untuk mendukung tugas TNI dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara dgn cara melanjutkan upaya pemberdayaan wilayah. Bersama seluruh komponen bangsa Indonesia lainnya melaksanakan Deteksi Dini,cegah dan tangkal sedini mungkin terhadap berbagai perkembangan situasi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankamyg dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan NKRI. Mekanisme deteksi,cegah dan tangkal dini melalui kerjasama intelijen negara mulai tingkat nasional sampai badan - badan intelijen setempat di daerah.Tingkat daerah : badan intelijen daerah baik TNI, POLRI maupun Kejaksaan merupakan badan pelaksana Intelijen.

Sebagaimana penjelasan Dandim dimana Kodim merupakan unsur pelaksana Strategis Matra Darat yang bersifat kewilayahan. Tugas pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat, dan menjaga keamanan wilayahnya dimana Koramil merupakan Satuan Pelaksana dan Babinsa sebagai ujung tombak gelar kekuatan TNI AD. Kodim merupakan patner pemerintah daerah dalam Forum Pimpinan Daerah dalam mengantisipasi perkembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam wilayah yang berpotensi terjadinya konflik. Kodim beserta jajarannya selain melaksanakan tugas pokok dalam menyiapkan pertahanan matra darat, juga melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai perundang-undangan. Salah satu yang dilakukan oleh Kodim dan jajarannya adalah pelatihan dasar keprajuritan yang dibutuhkan oleh Pemda sesuai permintaan, untuk melatih Hansip/Linmas baik dalam pelatihan disiplin, maupun dalam penanggulangan bencana. Selain itu melaksanakan pemantauan wilayah melalui kegiatan deteksi dini, temu

cepat, dan lapor cepat yang dilakukan oleh seluruh anggota Kodim dan anggota TNI yang ada di wilayah Kodim. Kodim beserta jajaran membantu Pemda dalam mengantisipasi konflik sosial pada ancaman Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam melalui kegiatan Binter²⁷.

Penjelasan Dandim tentang Binter, pada dasarnya ditujukan untuk membangun kesadaran bela negara masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi sosial, silaturahmi, dan tatap muka dengan seluruh elemen masyarakat yang dilakukan oleh seluruh jajaran Kodim di wilayah binaannya. Selain itu Kodim dan jajaran melaksanakan kegiatan Bhakti TNI dengan melaksanakan pengobatan masal, donor darah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, dan lain-lain. Adapun tujuannya untuk membantu Pemda dalam peningkatan kesejahteraan serta membangun kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, sehingga terbangun ketahanan wilayah yang kuat.

Kegiatan lainnya yang dilakukan bersama pemerintah daerah yaitu kegiatan TNI manunggal membangun daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Tujuan ini secara fisik untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum seperti jalan dan rumah ibadah dan yang bersifat nonfisik untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nilai gotong royong, rasa persatuan dan kesatuan, dan bagi kepentingan TNI adalah untuk meningkatkan kemandirian TNI Rakyat. Dengan dilaksanakan kegiatan Binter secara menyeluruh di seluruh wilayah bekerjasama dengan Pemda, Polres, dan segenap elemen masyarakat, dan Babinsa sebagai ujung tombaknya, diharapkan konflik dan ancaman Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam dapat diredam dan dieliminir.

2.1.6 Efektivitas

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.

²⁷ Hasil wawancara Dandim 0618/BS pada 15 Februari 2014

Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu. secara sederhana, efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Komaruddin²⁸ menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” Selanjutnya The Liang Gie²⁹ juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.” Sedangkan Gibson³⁰ mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.” Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson

²⁸Komaruddin. Ensiklopedia Manajemen. Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 294.

²⁹The Liang Gie, Efisiensi Kerja Bagi Aparat Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2000, Jakarta, hal 24

³⁰Gibson, Ivancevich, Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses. Penerbit Erlangga. Jakarta, 1984, hal 28.

yang dikutip Handyaningrat³¹ yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum³² mengemukakan:

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers³³ mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih luas lagi diketahui bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Etzioni dkk³⁴ mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran”. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Menurut pendapat Mahmudi³⁵ menjelaskan bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar

³¹Hadayaninrat Soerwarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*. Gunung Agung. hal 1994, Jakarta,16

³²Georgopolous dan Tannenbaum. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta,1985, hal 50,

³³Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Erlangga, Jakarta,1985, hal 87

³⁴Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modern*. UI Press, Jakarta, 2005, hal 54-55.

³⁵Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta, 2005,hal 92

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1 Hubungan Arti Efektivitas

Sumber: (Mahmudi, 2005:92)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip Moenir³⁶ (mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)”

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dikombinasikan dengan kata efisien

³⁶Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 166.

walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Selanjutnya menurut pendapat Markus Zahnd³⁷ mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, adalah “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Kurniawan³⁸ mendefinisikan efektivitas sebagai “Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan. Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor

³⁷Zahnd, Markus. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal200-201.

³⁸Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*.Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hal 109.

keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2.1.6.2 Pendekatan Efektivitas

Untuk menganalisis efektif tidaknya suatu organisasi tentunya diperlukan pengukuran dan penilaian, sedangkan pendekatan dalam pengukuran dan penilaian efektivitas organisasi beraneka ragam sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah ahli sebagai berikut; Gibson et al³⁹ menegaskan pendekatan dalam menilai efektivitas organisasi adalah:

1. Pendekatan Tujuan

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem;

2. Pendekatan Teori Sistem

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi.

Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan: (1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana, dan (2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana

³⁹Gibson, James L., *Organizations Behaviour Structure and Process*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc. 1995, hal 380

organisasi itu berada. Jadi : (1) Efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen. (3) Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya;

3. Pendekatan *Multiple Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Sementara itu Robbins⁴⁰ mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi adalah :

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*)

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan sistem

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan konstituensi strategis

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-

⁴⁰Robbins, Stephen P.. Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Arcan, Jakarta, 1994, hal,54

masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan didasarkan pada pandangan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan *Multiple Constituency* merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih komperhensif bagi tercapainya efektifitas organisasi. Sementara itu, untuk pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekatan yang menyatukan ketiga pendekatan yang telah dikemukakan di atas yang disesuaikan dengan nilai suatu kelompok. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana. Banyak organisasi yang besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian tersebut mempunyai sasarannya sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas.

Perspektif yang lain melihat organisasi sebagai suatu sistem terbuka, terus menerus berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada kekuatan-kekuatan lingkungan sementara memaksimalkan sumber-sumber daya yang diperolehnya dari lingkungannya dan dari organisasi-organisasi lain. Suatu organisasi berusaha untuk mempertahankan bagi dirinya tingkat fleksibilitas yang diperlukan agar organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan, baik didalam dirinya sendiri maupun lingkungan luar. Pendekatan sistem terbuka melihat efisiensi dan efektivitas sekedar sebagai dua unsur yang dipakai dalam penilaian-penilaian organisasi berikut alokasi sumber dayanya.

2.1.6.3 Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Selanjutnya, berikut ini dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas menurut Gibson dkk⁴¹ indikator efektivitas dapat diukur :

1. Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.
4. Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
5. Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya

⁴¹Gibson, Ivancevich, *Organisasi Edisi Kelima*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1989, hal 34.

secara optimal. Menurut pendapat David Krech et. al⁴², menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis⁴³ yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Strees⁴⁴ mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

⁴²Crutchfield, Richard S., Krech, David and Ballachey, Egerton L.. *Individual In Society*. New York. McGraw-Hill, 2004, hal 119-120.

⁴³Martini dan Lubis. *Teori Organisasi*. Ghalia Indonesia, Bandung, 1987, hal 55,

⁴⁴Tangkilisan, Nogi Hessel. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jaakarta, 2005, hal 141.

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlabar
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Duncan⁴⁵ mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan, pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi, integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi, adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim⁴⁶ yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variable*)
Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:
 - a. Struktur yaitu tentang ukuran;
 - b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;
 - c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya;
 - d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja dan lain-lain.
2. Variabel terikat (*dependent variable*)
Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:
 - a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;

⁴⁵Gibson, James L., *Organizations Behaviour Structure and Process*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc. 1995,hal ,53

⁴⁶Danim, Sudarwan. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. PT Rineka Cipta. Bengkulu, 2004, hal 121-122.

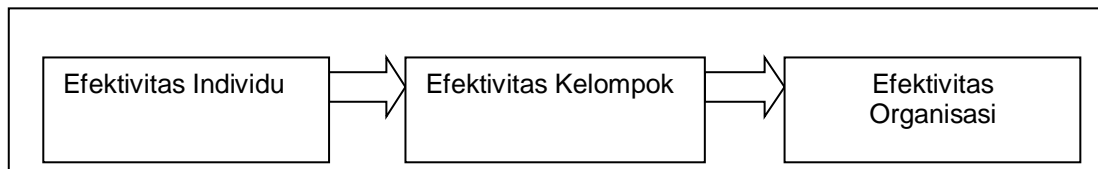
- b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.
3. Variabel perantara (*interdependent variable*)
Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut, di samping itu evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustainability*).

2.1.6.4 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Efektivitas organisasi publik maupun bisnis dapat dikaji secara komprehensif dari tiga perspektif, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Hal ini dimaksudkan bahwa di dalam mengukur efektivitas suatu organisasi maka yang pertama harus diukur adalah efektivitas individu yang menekankan pada kinerja pelaksanaan tugas dari karyawan tertentu pada unit tertentu. Selanjutnya, efektivitas kelompok menggambarkan kontribusi secara sinergis seluruh anggota kelompok pada unit kerja tertentu. Akhirnya, efektivitas organisasi mencerminkan pencapaian tujuan organisasi yang merupakan kontribusi dari setiap unit atau bagian dalam suatu organisasi secara keseluruhan.

Hubungan ketiga perspektif tersebut menurut Gibson, et al,⁴⁷ (dapat digambarkan sebagai berikut:

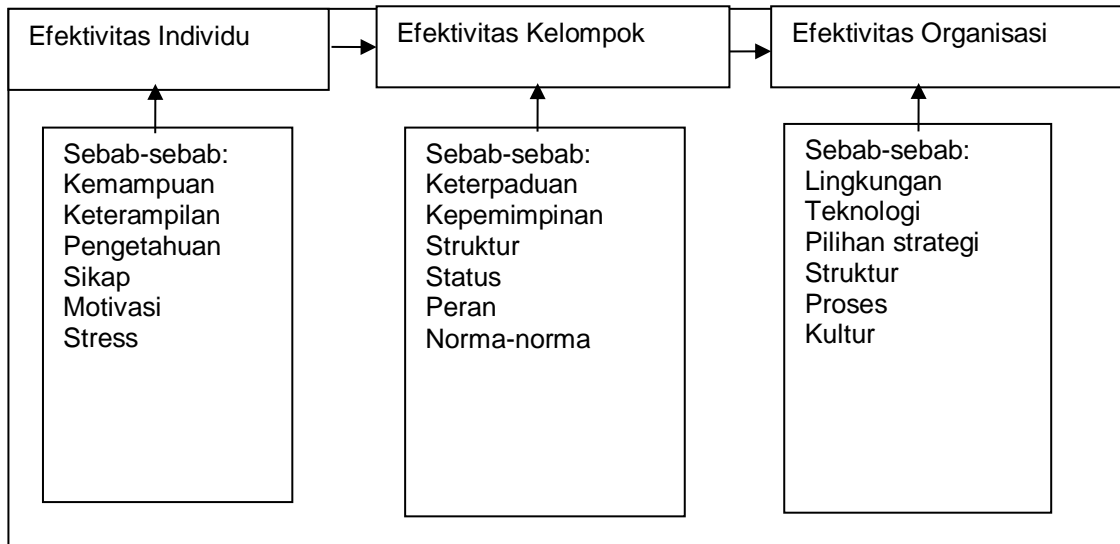


Gambar 2.2 Hubungan Efektivitas

Sumber : Gibson, et al, (1995:32)

⁴⁷Gibson, James L., *Organizations Behaviour Structure and Process*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc. 1995, hal 32.

Oleh karena itu dalam setiap upaya manajemen atau pemimpin organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi harus memperhatikan hubungan individu dalam kelompok dan kelompok terhadap organisasi. Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan tertentu sudah pasti dipengaruhi oleh sejumlah unsur atau faktor, baik terhadap efektivitas individu, kelompok, maupun organisasi. Hasil Penelitian John R. Kemberly dan David B. Rottaman⁴⁸ (menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab efektivitas individu, kelompok, dan organisasi yaitu:



Gambar 2.3 Sebab Efektivitas

Sumber : Gibson, et al (1995:32)

Menurut Steers⁴⁹ terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, yaitu:

1. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Steers, M Richard. Op.cit, hal 8.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi⁵⁰ berpendapat bahwa Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai

⁵⁰Sumaryadi, I Nyoman. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta, 2005, hal 105.

dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Semua pendapat di atas menggambarkan bahwa efektivitas hanya berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran, sedangkan masalah penggunaan masukan dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan lebih menekankan pada efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan kriteria dan indikator untuk menilai efektif tidaknya pencapaian tujuan dan kerja suatu organisasi. Menurut Steers⁵¹ bahwa terdapat lima kriteria yang dapat digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu: (1) Produktivitas; (2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas; (3) Kepuasan kerja; (4) Kemampuan ber laba; dan (5) Pencarian sumber daya. Berbagai kriteria efektivitas organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Gibsson et al⁵² dimana kriteria tersebut dihubungkan dengan waktu (dimensi waktu), yaitu:

Tabel 2.1
Model Dimensi Waktu dari Efektivitas

Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka Panjang
Produksi Mutu Efisiensi Fleksibilitas Kepuasan Kesiapan Pergantian pegawai	Persaingan Pengembangan	Kelangsungan hidup

Sumber : Gibson, et al (1995:51).

Efektivitas organisasi jangka pendek sebagai penentu efektivitas organisasi jangka menengah dan efektivitas jangka menengah menjadi penentu efektivitas organisasi dalam jangka panjang yaitu kelangungan hidup organisasi atau institusi. Terdapat tiga aspek fleksibilitas mempengaruhi efektivitas organisasi. Pertama, adalah kemampuan dalam

⁵¹Tangkilisan, Nogi Hessel. Op.cit, hal64.

⁵²Gibson, James L., , *Organizations Behaviour Structure and Process*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc, 1995, hal51

menjawab perubahan lingkungan eksternal (persaingan, peraturan pemerintah). Kedua, individu dan kelompok organisasi harus menjawab perubahan individu dan kelompok lain di dalam organisasi yang sama. Ketiga, organisasi harus dapat mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dan kebijakan untuk menjawab perubahan yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:

2.2.1 Alinipia Pasaribu

Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Optimalisasi Peran Detasemen Intelijen Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Kasus Denintel Kodam Iskandar Muda)”. Penelitian ini lebih difokuskan pada pemberdayaan wilayah pertahanan melalui penambahan Satuan Kodim meskipun disadari akan memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan ketahanan wilayah. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini berorientasi pada pelaksanaan fungsi intelijen TNI AD yang dilakukan oleh Deninteldam IskandarMuda dalam mendukung ketahanan wilayah, sehingga dari aspek keaslian penelitian, bagian yang akan dilakukan ini memenuhi syarat.

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan tentang fungsi intelijen, sehingga penelitian ini termasuk penelitian terapan atau yang dikenal dengan penelitian kebijakan (*policy research*), karena melakukan penyelidikan dan analisis terhadap suatu kebijakan yang dimulai dari deskriptif, preskriptif hingga pada prediktif. Hasil-hasil penelitian dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah kebijakan, agar relevan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Hambatan yang dialami oleh Deninteldam

IskandarMuda dalam melaksanakan fungsi intelijen TNI Angkatan Darat yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pertahanan negara, selain faktor internal (kurangnya sarana prasarana dan kurangnya kuantitas dan kualitas personil) juga faktor eksternal.

Beberapa faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian terutama adalah : masih adanya indikasi disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu, dan masih adanya kecemburuan sosial baik dalam tahap implementasi otonomi daerah maupun pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi NAD termasuk pembinaan politik atau organisasi kemasyarakatan, serta dukungan anggaran yang belum memadai baik dalam biaya untuk melakukan operasional (transportasi maupun pengadaan Alutsista yang terkait dengan alat untuk melakukan tugas intelijen (alat komunikasi khusus). Implementasi peran Deiniteldam IskandarMuda dalam melaksanakan fungsi intelijen TNI Angkatan Darat seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta pembinaan satuan telah dilakukan sesuai dengan arah kebijakan baik Panglima Kodam IskandarMuda maupun Panglima TNI, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan fungsi pertahanan negara, yang pada akhirnya berpengaruh pada ketahanan wilayah.

2.2.2 Wahyu Haminarko

Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2012 dengan judul “Optimalisasi Peran intelijen Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran intelijen dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Mojokerto provinsi Jawa Timur dan untuk mengetahui implikasi peran intelijen terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Penelitian ini menyebutkan bahwa peran intelijen daerah Kabupaten Mojokerto, menunjukkan komitmen politik pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan intelijen daerah untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap perkembangan dan gejala dilapangan sehingga pemerintah daerah melalui perangkatnya dapat menangkal kekuatan maupun niat dari pihak lain yang ingin mengganggu stabilitas keamanan daerah. Peran intelijen membantu pemerintah secara terus menerus dengan fungsinya sebagai penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan mencari, mengumpulkan setiap perkembangan untuk dianalisa sebagai data intelijen yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan pimpinan. Kebijakan yang tidak didasari oleh akurasi data intelijen dapat menimbulkan kerawanan bahkan ancaman baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu juga menurut peneliti ini, peran intelijen diukur dengan perkembangan gejala yang ada di daerah atas kebijakan pemerintah untuk peningkatan ekonomi daerah. Gejala, dalam hal ini, merupakan aksi penolakan atas kebijakan pemerintah yang dilakukan masyarakat maupun organisasi masyarakat karena merasa dirugikan atas kebijakan tersebut sehingga stabilitas keamanan daerah terganggu. Kompleksitas perkembangan dinamika politik menuntut aparat intelijen untuk memiliki pengetahuan serta kepekaan terhadap perubahan, agar dapat melakukan fungsinya secara terus menerus dalam membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

Untuk itu optimalisasi peran intelijen merupakan langkah dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang diwujudkan dalam menjalankan fungsi intelijen yang sesuai dengan visi misi pembangunan daerah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perannya, eksistensi intelijen

menunjukkan akurasi dalam mengikuti perubahan pergeseran aspek sosial di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka mengoptimalkan perannya, koordinasi antar Kominda sangat diperlukan mengingat pentingnya data intelijen dalam rangka pengambilan kebijakan pimpinan daerah untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Peran intelijen dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah memiliki implikasi positif terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Mojokerto, karena situasi yang aman dan kondusif serta diikuti tatanan perikehidupan pada berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

2.2.3 Triatmo Hamardiyono

Jurnal penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Kebijakan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Deteksi dan Peringatan Dini Studi Kerusuhan Massa di Kabupaten Temanggung”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kominda dalam deteksi dan peringatan dini adalah: 1) Komunikasi, 2) sumber daya, 3) Disposisi / Sikap, sikap implementor yang bertanggung jawab dan. 4) Struktur Birokrasi. Selanjutnya penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Antonio Freitas dengan judul Intelijen dan Keamanan Nasional Timor Leste. Penelitian ini menjelaskan bahwa keamanan nasional Timor Leste merupakan salah satu kepentingan vital, karena itu untuk mempertahankannya Timor Leste bersedia untuk menggunakan segala macam cara termasuk intelejen dan kekuatan militer untuk mempertahankannya. Dari pengertian konsep keamanan nasional Timor Leste diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa keamanan nasional Timor Leste difokuskan pada upaya mengatasi berbagai ancaman terhadap vitalitas kelangsungan negara serta menentukan obyek yang dapat menjadi acuan guna melindungi kepentingan keamanan nasional dalam mengukur perkembangan

keamanan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan arah tindakan serta sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin keamanan nasional melalui kegiatan intelijen Timor Leste.

2.3 Kerangka Pemikiran

Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan vital suatu negara. Karena itu untuk mempertahankannya, suatu negara bersedia menggunakan segala macam cara termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya. Konsep keamanan nasional atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warganegara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi dalam Negara-bangsa. Konsep keamanan nasional yang dikemukakan oleh Frank N. Trager dan F.N Simonie⁵³ mendefinisikan *national security is that part of government policy having as its objectives the creation of national and international political conditions favorable to the protection or extension of vital national values against existing and potential adversaries.*

Dari pengertian konsep keamanan nasional diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa keamanan nasional difokuskan pada upaya mengatasi berbagai ancaman terhadap vitalitas kelangsungan negara serta menentukan obyek yang dapat menjadi acuan guna melindungi kepentingan keamanan nasional dalam mengukur perkembangan keamanan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan arah tindakan serta sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin keamanan nasional.⁵⁴ Literatur tersebut dapat dijadikan sebagai barometer guna mengidentifikasi berbagai persepsi tentang keamanan nasional dalam tataran persepsi militer dan non-militer seiring dengan konstelasi geostrategis keamanan baik secara nasional maupun internasional maka yang menjadi dasar bagi penciptaan instrumen keamanan nasional adalah

⁵³ Aleksius Jemadu. Politik Global dalam Teori & Praktik: Graha Ilmu. Yogyakarta, 2008, hal 137

⁵⁴ Richard Ulman, "Redefining Security", in the International Security. 1983, jurnal Vol.1.hal 133

military approach dan *prosperity approach* guna mendeteksi keamanan secara komprehensif.

Pada pelaksanaan sistem deteksi dini, intelijen dapat berperan dalam mencegah berbagai tindakan yang dapat mengganggu pertahanan negara dari berbagai ancaman. Adapun Intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Pada pelaksanaannya, efektivitas dalam organisasi intelijen diperlukan dalam upaya optimalisasi deteksi dini, adapun pengukuran dari efektivitas tersebut sebagaimana yang dikemukakan Martani dan Lubis⁵⁵ yang terdiri dari dimensi:

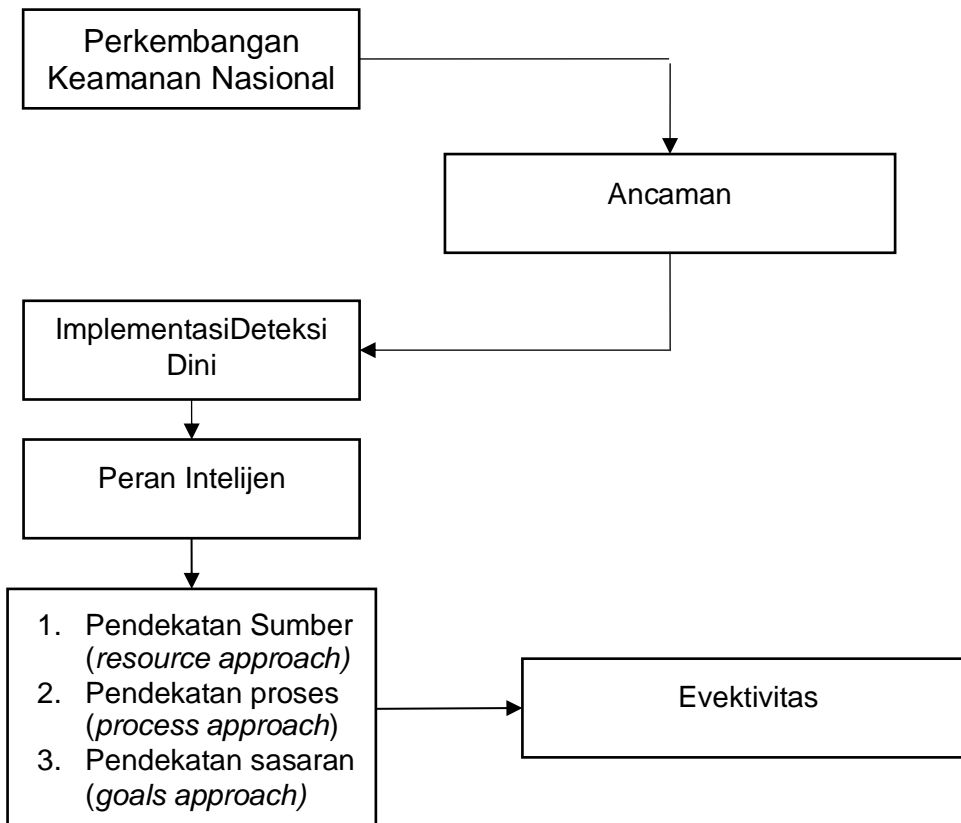
“Pertama, pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ketiga, pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.”

Penelitian ini memfokuskan masalah efektivitas fungsi intelejen dalam mendukung strategi pertahanan yaitu ketika tidak semua kegiatan intelijen pada Denintel memiliki efektivitas dalam melaksanakan deteksi

⁵⁵Martini dan Lubis. *Teori Organisasi*. Ghalia Indonesia, Bandung, 1987, hal 55,

dini. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya, legislasi, dukungan dan partisipasi masyarakat sampai dengan kompetensi yang dimiliki intelijen. Padahal, suatu organisasi termasuk Denintel pada prinsipnya membutuhkan efektivitas dalam melihat bagaimana hasil dari kinerja intelijen

Berdasarkan uraian di atas, maka proposisi di dalam penelitian ini adalah “Efektivitas fungsi intelejen dalam mendukung strategi pertahanan ditentukan oleh dimensi Pendekatan Sumber (*resource approach*), Pendekatan proses (*process approach*) Pendekatan sasaran (*goals approach*)” Adapun berikut inimerupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2013

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*) antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Creswell⁵⁶ (2003: 32) menjelaskan bahwa:

“in a mixed methods study, the researcher uses either a qualitative or a quantitative approach to the literature depending on the type of mixed methods design being used. In a sequential design, the literature is presented in each phase in a way consistent with the type of design being used in that phase.”

Berdasarkan pendapat tersebut dijelaskan bahwa dalam penelitian *mixed methods*, peneliti menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan literatur tergantung pada jenis desain *mixed methods* yang digunakan. Desain berurutan disajikan setiap fase dengan cara yang konsisten sesuai jenis desain yang digunakan dalam fase itu, dimana proporsi dari masing-masing fase bervariasi.

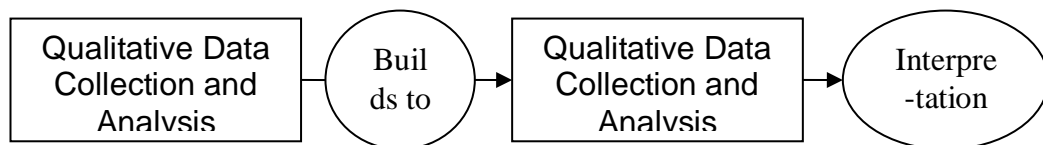
Pemilihan penggunaan metode penelitian campuran (*mixed methods*) dikarenakan *mixed methods* diyakini dapat memberikan lebih banyak gambaran tentang persoalan atau masalah penelitian. Selanjutnya penggunaan *mixed methods* memberikan peluang peneliti untuk menggali lebih banyak data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga memiliki data yang lebih lengkap. Desain *mixed method* dalam penelitian ini menggunakan strategi eksploratoris sekuensial yang memiliki ciri khas fokus penelitian mengeksplorasi suatu fenomena, dimana pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian dilanjutkan pada tahap kedua dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama.

⁵⁶ Creswell John, W. *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, London, 2004, hal 32

Prioritas penelitian ini lebih cenderung pada tahap pertama, dan proses pencampuran (*mixing*) antar kedua metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan antara analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Creswell⁵⁷ yang menyatakan bahwa:

“Exploratory sequential design (also referred to as the exploratory design) also uses sequential timing. In contrast to the explanatory design, the exploratory design begins with and prioritizes the collection and analysis of qualitative data in the first phase. Building from the exploratory results, the researcher conducts a second, quantitative phase to test or generalize the initial findings. The researcher then interprets how the quantitative results build on the initial qualitative results.”

Pendapat di atas menerangkan bahwa penekanan utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif yang berhubungan dengan tema penelitian yang diperkuat oleh analisis data kuantitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ni:



Sumber : Creswell (2011 : 69)

Gambar 3.1 Exploratory Sequential Design

Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan suatu realitas tentang efektivitas fungsi intelijen dalam mendukung strategi pertahanan di wilayah Jawa Barat. Pada langkah kualitatif, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat dengan menyajikan sebuah proposisi. Sedangkan langkah kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam katagoriasi. Langkah kuantitatif penelitian ini bersifat deksriptif dilakukan melalui pembagian kuesioner untuk melihat efektivitas

⁵⁷ *Ibid.*, hal 71

dari sudut pandang intelijen Deintel. Jadi hasil dari penelitian campuran (*mixed methods*) ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai efektivitas fungsi intelijen dalam mendukung strategi pertahanan di wilayah Jawa Barat

3.2 Sumber Data Penelitian.

Penelitian ini, disamping menggunakan sumber literatur, juga sumber wawancara dari para narasumber yang kompeten sebagai informan kunci, sebagai berikut:

- a. Asintel Kodam III/Siliwangi.
- b. Dandim 0618/BS Kodam III/Siliwangi.
- c. Dandenintel Kodam III/Siliwangi.

Selain menggunakan wawancara, sumber data penelitian melalui kuesioner dilakukan pada sebagian intelijen di Denintel Kodam III/Siliwangi. Sebelum melakukan pembagian kuesioner, peneliti terlebih mengkonsepkan indikator sebagaimana tabel operasionalisasi variabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Kategorisasi Efektivitas

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas	1. Pendekatan Sumber (<i>resource approach</i>)	1. Sumber Peralatan 2. Sumber Motivasi
	2. Pendekatan proses (<i>process approach</i>)	1. Dukungan lembaga pada proses 2. Mekanisme proses
	3. Pendekatan sasaran (<i>goals approach</i>)	1. Keseusian rencana 2. Kesesuaian hasil

Penelitian ini menggunakan teknik sampel *Systematic Sampling*, adalah teknik sampling sederhana yang dilakukan secara ordinal. Artinya, anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. Sampel diperoleh dengan mengambil secara teratur/pola tertentu dari populasi yang telah

diberi nomor. Selanjutnya sampel dalam penelitian adalah sebagian intelijen di Denintel Kodam III/Siliwangi yang berjumlah 161 orang. Jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus:

$$s = \frac{\chi^2 . N . P . Q}{d^2 (N - 1) + \chi^2 . P . Q}$$

Keterangan:

S : ukuran sampel minimal

N : ukuran populasi = 161

P : 0,5

Q : 1-P = 0,5

d : tingkat kesalahan sampling yang diinginkan = 5%

χ^2 : nilai χ^2 pada derajat bebas 1 dan tingkat signifikansi 5% = 3,481

Jika nilai-nilai yang telah diketahui tersebut disubstitusikan ke dalam rumusan jumlah sampel maka diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak;

$$s = \frac{\chi^2 NPQ}{d^2 (N - 1) + \chi^2 PQ} = \frac{3,481(161)(0,5)(0,5)}{0,05^2 (161 - 1) + 3,481(0,5)(0,5)} = 110,27 \text{ dibulatkan } 110$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 responden.

3.3 Jenis-Jenis Data.

Salah satu kaidah dasar penelitian kualitatif adalah senantiasa menggunakan sumber-sumber data primer maupun sumber-sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer maupun data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data-data atau informasi yang didapat secara langsung dari objek melalui metode tertentu, seperti wawancara secara mendalam, observasi dan kuesioner.
- b. Data sekunder, yakni data-data atau informasi tambahan yang didapat melalui kajian kepustakaan, seperti hasil-hasil penelitian yang sejenis, dokumentasi, berita media massa, dan literatur-literatur relevan lainnya.

3.4. Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sementara, dalam penelitian kualitatif penelitalah yang akan lebih banyak menjadi instrument. Sebab, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan *key instruments*. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Valid, yakni suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Analoginya misalnya meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat.
- b. Reliabel. Reliabel adalah keajekan (konsistensi) alat pengumpul data/ instrumen dalam mengukur apa saja yang diukur. Instrumen yang reliabel maksudnya instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Meteran dari karet yang digunakan untuk mengukur panjang merupakan contoh alat ukur yang tidak reliabel.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa *interview guide*⁵⁸. Sehingga satu-satunya instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri karena peneliti sebagai pengumpul data yang mempengaruhi terhadap faktor instrumen⁵⁹. Adapun reliabilitas dan validitasnya lebih pada kelayakan dan kredibilitas peneliti karena alat ukur dalam penelitian kualitatif bersifat kualitatif juga, sehingga sangat abstrak, akan tetapi lengkap dan mendalam.

⁵⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004, hal. 113.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hal.71

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah suatu langkah pokok dalam suatu penelitian karena sangat menentukan variabel yang diperlukan dalam pengukuran. Untuk itu, penyusunan instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius dan sistematis. Dalam tesis ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara/*Interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan *stakeholders* penelitian ini dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*⁶⁰. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sumber informasi sebagaimana yang telah diutarakan di atas dan melakukan tanya jawab secara mendalam (*depth interview*).

c. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pengadopsian teori-teori dan analisa data penelitian sejenis serta data yang diangkat dan diberitakan melalui media massa serta literatur relevan lainnya.

d. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner tersebut dibagikan kepada populasi yaitu intelijen di Denintel Kodam III/Siliwangi. Adapun pembagian kuesioner tersebut dalam rangka

⁶⁰Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 194.

mengetahui dalam mendeskripsikan efektivitas. Sebelum kuesioner didistribusikan dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu, yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji homogenitas item pertanyaan per variabel untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsinya. Semakin tinggi validitas alat ukur maka semakin kecil varian kesalahannya. Dengan demikian uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas kuesioner digunakan rumus korelasi *Product Moment* Pearson, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n (\sum xy) - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi *Product Moment* Pearson

y = skor item total

x = skor pertanyaan

n = jumlah pertanyaan

Dengan kriteria jika diperoleh r hitung $>$ r tabel, butir pertanyaan tersebut valid, tetapi jika r hitung \leq r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. Selanjutnya uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Program *SPSS ver 21 for windows*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan mantap bila dalam pengukurannya secara berulang-ulang dapat memberikan hasil yang sama (dengan catatan semua kondisi tidak berubah). Jadi, suatu kuesioner

disebut reliabel atau handal apabila jawaban seseorang atas pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reabilitas digunakan alat ukur dengan teknik Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2006:146).

$$r_n = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha_b^2}{\alpha_1^2} \right]$$

Keterangan:

- r_n = Reliabilitas instrumen
- k = Banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \alpha_b^2$ = Jumlah varian butir
- α_1^2 = Varian total

Keputusan reliabel tidaknya kuesioner dinyatakan apabila diperoleh nilai r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan 5% maka butir pertanyaan tersebut reliabel. Uji reliabilitas dengan SPSS ver 16 for windows yang dilakukan adalah menggunakan *Reliability Analysis Statistic dengan Cronbach Alpha (α)*. Jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.60, maka dapat dikatakan variabel tersebut reliabel.

3.6 Pengolahan/Analisa Data.

Pengolahan data atau analisa data merupakan fase yang penting dan menentukan sebab pada tahap inilah data diolah dan dimanfaatkan sampai berhasil mengumpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dicapai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian, sehingga imajinasi dan kreativitas peneliti yang signifikan bagi konstruksi data selanjutnya.

Pada penelitian ini, pengolahan atau analisa data dapat dilakukan dalam empat fase yaitu⁶¹:

- a. Menelaah data

⁶¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2000. Hal. 32.

Pada fase ini data yang diperoleh dipelajari lagi untuk mengevaluasi kompleksitas data yang merefleksikan dan memenuhi kebutuhan untuk interpretasi dan penyimpulan. Jika data yang diperoleh dirasa belum cukup maka pengumpulan data yang kurang harus segera dilakukan.

- b. Reduksi
Reduksi data meliputi proses menilai data, analisa dan membuat kesimpulan berupa abstraksi atau rangkuman.
- c. Klasifikasi/Kategorisasi
Klasifikasi atau kategorisasi dimaksudkan agar data yang dianalisa serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dijawab dalam penelitian. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi data yang sekiranya tidak diperlukan lagi.
- d. Interpretasi
Interpretasi merupakan proses pemaknaan dari hasil pengolahan data yang harus dilakukan secermat mungkin (analisa yang mendalam). Interpretasi dapat dilakukan dengan mengadakan *cross checking* kembali antar data untuk menjamin validitas data.

3.7 Keabsahan Data/Validasi Data.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan 4 model uji validasi instrumen dan data. Pengujian validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji deperability, dan uji confirmability.

Pertama, Uji Kredibilitas. Uji kredibilitas atau Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif mencakup antara lain:

- a. Perpanjangan pengamatan. Peneliti kembali melakukan pengamatan dilapangan/lokasi penelitian. Artinya hubungan peneliti dengan partisipan/narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
- b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian. Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau benar. Peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.
- c. Triangulasi. Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
 - a) Triangulasi sumber.

- b) Triangulasi teknik pengumpulan data.
- c) Triangulasi waktu pengumpulan data.
- d. Analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuannya, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e. *Memberchek*. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* untuk mengetahui sejauhmana data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data.

Kedua, Uji Transferability. Uji transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian dan ada kemungkinan menerapkannya, maka peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Ketiga, Uji Depenability dan Uji Konfirmability. Uji dependability dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian, yaitu dilakukan oleh auditor yang independen. Sementara, Uji Konfirmability hampir sama dengan uji dependability, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Oleh karena itu dua pengujian ini sering kali dilakukan bersama-sama.